

KINERJA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) KALIMANTAN BARAT SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

Oleh:

**TRI WAHYUNI
NIM. E21110033**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, e-mail : ayudia.tri882@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan permasalahan bahwa ketidakmampuan direksi / pimpinan atau karyawan dalam manajemen yang disebabkan tidak adanya wewenang, dan tidak terpenuhinya kondisi minimal yang ditentukan untuk beroperasi secara penuh serta kurangnya modal awal dan kurangnya persiapan atau tidak direncanakan secara cermat dalam melaksanakan pekerjaan. Teori yang digunakan peneliti yaitu Agus Dwiyantoter dapat tiga hal ialah Kualitas Kerja, Efisiensi Kerja, dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi didalam pengumpulan data. Yang menjadi subyek yaitu bagian SDM TVRI, bagian staf TVRI dan masyarakat. Serta menggunakan teknik snowbol. Konsep yang digunakan yaitu kinerja dilihat dari kualitas, efisiensi dan akuntabilitas. Analisa data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan deduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah cukup baik hal ini dilihat dari kualitas pekerjaan yang cukup baik disebabkan pimpinan yang tegas dalam menindak bagi pegawai yang menyimpang / melanggar aturan. Pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi yang jelas. Efisiensi kerja cukup baik karna pegawai sudah cukup berpengalaman, karna terbatasnya sarana dan prasarana serta kewenangannya yang kurang dari pusat membuat kurang optimalnya kerja. Akuntabilitas atau kemampuan pegawai cukup baik dikarnakan pegawai bekerja disesuaikan dengan bidang ahlinya sehingga profesional. Sarannya pimpinan perlu meningkatkan inisiatif hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta pimpinan perlu memberikan peluang / kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan pendidikan dan disamping itu perlu menayangkan potensi – potensi daerah agar dapat diketahui dipahami tentang permasalahan – permasalahan atau pun pembangunan yang ada di Kalimantan Barat serta budaya budaya yang ada di sekitar Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Kinerja, Kualitas, Efisiensi dan Akuntabilitas.

ABSTRACT

Based on the problems that the inability of directors / leaders or employees incompetence in management due to the lack of authority, and the non-fulfillment of the minimum conditions specified to operate in full as well as the lack of initial capital and lack of preparation or not carefully planned in carrying out the work. Researchers used the theory that there are three things Agus Dwiyanto is Quality Work, Work Efficiency and Accountability. This research uses qualitative descriptive analysis, by conducting interviews, observation and documentation in data collection. The subject is part of HR TVRI, part of the staff and the public TVRI. And using techniques snowbol. The concept used is the performance seen from the quality, efficiency and accountability. The data analysis stage data reduction, data display and deduction data. The results showed that the performance of employees is good enough it is seen from the quality of work is quite good due to the leadership of the firm in the action against the employee deviant / break the rules. Employees work in accordance with clear duties. Work efficiency is good enough because employees already quite experienced because of limited infrastructure and the lack of a central authority makes less optimal work. Accountability or employee kemampuan good enough dikarenakan employee works adapted to the field of experts so professional. He advised the leadership needs to improve this initiative due to the lack of infrastructure and leaders need to provide the opportunity / chance to employees to improve pendidikan.dan besides that need airing potesi - potential areas known to be understood about the problems - problems or existing development in West Kalimantan and cultures that exist around West Kalimantan.

Keywords: Performance, Quality, Efficiency and Accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya perkembangan teknologi untuk mendapatkan informasi yang terbaru dalam segala bidang. Tanpa adanya suatu informasi masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi saat ini adalah televisi.

Televisi merupakan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi guna menciptakan pesan dan kesan, serta memberikan hiburan kepada masyarakat luas. Televisi memiliki jangkauan yang luas dan kecepatan penyampaian berita dan informasi, sehingga dapat dengan mudah dinikmati oleh seluruh masyarakat baik yang tinggal di desa maupun di kota. Oleh karena itu, media televisi sangat berperan dalam interaksi budaya antar bangsa serta dalam berwawasan masyarakat, membangun serta memajukan suatu bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah maka di daerah banyak muncul televisi yang akan berkiprah di daerah, sebab televisi sekarang adanya kebebasan untuk beroperasi hal ini diharapkan dengan adanya muncul televisi akan dapat memajukan daerah ataupun sebagai alat untuk membangun informasi media atas pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Di Indonesia terdapat banyak stasiun televisi swasta dan stasiun televisi milik pemerintah yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI). TVRI merupakan

salah satu media elektronika yang sangat luas jangkauannya dan mempunyai potensi sangat besar dalam menyampaikan pesan – pesan dari pemerintah terhadap masyarakat agar masyarakat, mengetahui serta memahami apa yang akan dan perlu diketahui tentang informasi dan tujuan negara, serta untuk menggelorakan semangat dan pengabdian serta alat perjuangan bangsa, memperkokoh, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagai stasiun penyiaran milik pemerintah maka TVRI terus memacu diri di tengah-tengah maraknya arus teknologi komunikasi khususnya dengan munculnya stasiun penyiaran televisi milik swasta. Pada saat ini stasiun televisi swasta semakin banyak dan satu sama lain saling bersaing untuk menarik pemirsanya. Hal ini membuat TVRI juga memberikan acara-acara yang menarik dan harus mampu meningkatkan mutu penyiaran baik acara yang bersifat berita maupun non berita, sesuai dengan misi yang diemban yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan.

TVRI sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan yang mewadahi TVRI, mulai dari Yayasan TVRI, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai Perseroan Terbatas (PT). Pada tanggal 24 Agustus 2006 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TVRI ke-44, TVRI kembali mengalami perubahan bentuk dan statusnya resmi berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau

Televisi Publik, yang ditandai dengan pelantikan Direksi LPP TVRI berdasarkan UU No 32 / 2002 tentang Penyiaran. Hal ini membawa nuansa baru yang membangkitkan harapan publik terhadap TVRI sebagai televisi publik dimasa mendatang.

TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI) akan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Di beberapa tempat yang belum mempunyai stasiun RRI ataupun TVRI dapat didirikan stasiun radio atau televisi lokal. Seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran Pasal 14 ayat 2 dan 3. Ayat 2 yaitu LPP terdiri atas RRI dan TVRI yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Ayat 3 yaitu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Upaya perubahan bentuk TVRI tersebut senantiasa didasari banyak pertimbangan, yang intinya adalah mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran televisi dan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Setiap kali dioperasikan dengan status baru, TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan tersebut dan kembali statusnya dipertanyakan, sehingga terjadilah perubahan status kelembagaan TVRI dalam waktu yang relatif pendek, dimana TVRI hanya selama dua tahun berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (2001-2003) dan dua tahun pula sebagai Persero (2003-2006), karena menurut UU No 32 / 2002 seharusnya TVRI telah berubah status menjadi Lembaga Penyiaran Publik (TV Publik) pada akhir tahun 2005.

Dengan UU No 32 / 2002, RRI dan TVRI akan berbalik sosok. Sebelumnya pemerintah dengan luasanya menggunakan RRI dan TVRI untuk kepentingan mereka. Di masa depan, RRI dan TVRI akan menyuarakan dan melayani publik. PP No 11 / 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dalam penjelasan menyebutkan, "Lembaga Penyiaran Publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan". RRI dan TVRI sebagai LPP yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, harus memberikan siaran yang independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat (seperti yang tertuang pada UU Penyiaran Pasal 14 ayat 1).

Berdasarkan sumber data dari http://tvconsulto.com/?page_id=71, kegagalan TVRI dalam melaksanakan misinya atau dalam memenuhi harapan masyarakat bukan disebabkan oleh status yang disandanginya atau hanya persoalan ketidakmampuan manajemen, Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris maupun karyawan, melainkan berawal pada tidak terpenuhinya kondisi minimal yang dibutuhkan untuk beroperasi secara penuh dengan status yang disandanginya, seperti modal awal, instrumen hukum yang diterapkan dan unsur pendukung lainnya. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya persiapan atau tidak direncanakan

secara cermat dan utuh, serta kurangnya partisipasi publik.

Setiap Lembaga Penyiaran Publik sangat membutuhkan partisipasi, kontribusi konkrit dan komitmen seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemikiran sampai tindakan nyata. Karena filosofi dasar Televisi Publik adalah dari publik, oleh publik dan untuk publik. Setelah terjadi beberapa kali perubahan bentuk pada tubuh TVRI tentu saja sangat berpengaruh pada kinerja dari TVRI itu sendiri. Sehingga dengan kondisi seperti itu membuat TVRI tidak dapat berbuat banyak, ataupun melakukan tayangan tayangan sesuai dengan perkembangan yang ada, artinya keterbatasan yang diilikiki karena modal bahkan aturan. Ataupun bersaing dengan munculnya televisi – televisi swasta yang muncul di daerah, dimana televi tersebut melakukan inovasi dalam tayangan sesuai dengan apa yang menjadi trend/ yang digemari oleh masyarakat. Sementara TVRI karena keterbatasannya membuat tayangan yang ada tidak dapat menyesuaikan/ memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan kemajuan atau trend yang ada, pada hal TVRI adalah sarana pemerintah yang sangat handal dalam menyampaikan informasi pemerintah terhadap masyarakat yang ada diseluruh tanah air. Maka Untuk itu penulis ingin mengetahui kinerja pelayanan serta bagaimana efektivitas TVRI Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program kerja dan pencapaian target, selain itu juga dengan mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan TVRI kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Ahmad Yani No. 60 Pontianak. Peneliti memilih lokasi ini karena TVRI adalah stasiun televisi milik pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan menyajikan acara - acara televisi yang menarik. TVRI hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk, sehingga hal ini mempengaruhi kinerja TVRI secara keseluruhan yang pada saat ini menjadi menurun.

Berkenaan dengan waktu penelitian ini dilaksanakan selama \pm 3 bulan setelah usulan penelitian disetujui oleh para dosen penguji dan dosen pembimbing pada saat usulan penelitian telah diseminarkan. Subjek penelitian adalah Bagian SDM TVRI. Bagian Staf TVRI lainnya, dan Masyarakat pengguna layanan TVRI.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), dan Verifikasi (*verification*). Sedangkan

untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi teknik.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kinerja Secara etimologis, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa arti yaitu : melakukan, memenuhi atau menjalankan sesuatu, melaksanakan suatu tanggung jawab dan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai yang diharapkan. Prawirosentono dalam Lijan Poltak Sinambela (2006:136).

Prawirosentono dalam Joko Widodo (2001:206) mengungkapkan bahwa kinerja (*performance*) sebagai kata benda (*noun*) mengandung arti “*thing done*” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (1995:503) kinerja diartikan sebagai sesuatu yang telah dicapai, prestasi yang telah diperlihatkan dan kemampuan kerja. Pengertian kinerja sebagaimana telah digambarkan, hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Suyadi Prawirosentono (1999:2) mengatakan bahwa *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Joko Widodo (2005:79) kinerja individu perorangan (*individual performance*) dan organisasi (*organizational performance*) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya suatu tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang sebagai pelaksana dapat menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan baik, sangat tergantung pada struktur (manajemen dan teknologi), dan sumber daya lain, seperti peralatan dan keuangan yang dimiliki oleh organisasi.

Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Joko Widodo (2001:206) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.

Swanson dan Holton III dalam Yeremias (2008:211) membagi kinerja atas tiga tingkatan yaitu : kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu. Menurut Ahmad Ruky istilah “kinerja/prestasi” sendiri sebenarnya adalah pengalih bahasaan dari kata “*PERFORMANCE*”. Sebagaimana dikatakan oleh Bernardin dan Russel dalam Ahmad Ruky (2002:15) yang memberikan definisi tentang performance adalah sebagai berikut :

“Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period” (Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu). Yang ditekankan disini adalah pengertian prestasi sebagai “hasil” atau “apa yang keluar” (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi pada organisasi. Sedangkan menurut Yeremias (2008:209) kinerja yaitu hasil kerja yang dijanjikan kepada publik pada setiap tahun anggaran termasuk yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam jabatan.

Kinerja akan dianggap memenuhi standar apabila permintaan akan informasi ditangani dengan segera dan sangat membantu dalam semangat “*can do/will do*” dan disampaikan dalam bentuk yang dikehendaki oleh pemakai informasi. (Surya Dharma, 2005:82).

Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2002:47) bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Penilaian kinerja, menurut Ahmad Ruky (2002:159) dilakukan pada akhir periode yaitu dengan membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, sasaran-sasaran tersebut harus diteliti satu per satu, mana yang telah dicapai sepenuhnya (100%), mana yang di atas standar (*target*) dan mana yang di bawah *target* atau tidak tercapai penuh. Menurut Salim dan Woodward dalam Agus Dwiyanto (2002:52) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

Menurut Dale Furtwengler penilaian kinerja mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Perbaikan kinerja
- b. Pengembangan karyawan
- c. Kepuasan karyawan
- d. Keputusan kompensasi

e. Keterampilan berkomunikasi

Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu dapat pula dijadikan input atau masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Lain halnya seperti dikutip dalam *International Journal of Business Performance Management* sebagai berikut :

"A framework to support performance measurement at the operative level of an organization." (*International Journal of Business Performance Management*, Vol.11, No.4/2009, Sanna Pekkola).

Maksud dari Jurnal Internasional tersebut yaitu dalam suatu organisasi sangat perlu dibuat kerangka kerja yang jelas untuk dapat mendukung pengukuran kinerja pada tingkat operasional, sehingga dapat terlihat jelas bagaimana kinerja dari suatu organisasi tersebut.

Menurut Surya Dharma (2005:101) bahwa penilaian kinerja didasarkan pada pemahaman pengetahuan, keahlian, kepiawaian, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan analisis tentang atribut perilaku seseorang sesuai kriteria yang ditentukan untuk masing-masing pekerjaan.

Dessler dalam Yeremias (2008:213) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja

seseorang agar bisa berada di atas rata-rata.

Menurut Surya Dharma (2005:130) mendeskripsikan bahwa kriteria bagi penilaian kinerja harus berimbang di antara :

- a. Pencapaian dalam hubungannya dengan berbagai sasaran.
- b. Perilaku dalam pekerjaan sejauh mempengaruhi peningkatan kinerja.
- c. Efektifitas sehari-hari.

Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator - indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efektifitas dan efisiensi, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, responsivitas, dan akuntabilitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik sering kali memiliki kewenangan monopolis sehingga parapengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, dengan pengguna jasa yang memiliki pilihan sumber pelayanan, penggunaan pelayanan dapat mencerminkan kepuasan terhadap pembari layanan. Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasannya terhadap pelayanan.

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuandan misi birokrasi sering kali bersifat multidimensional. Artinya adalah birokrasi memiliki stakeholders yang banyak dan memiliki kepentingan yang saling berbenturan

satu dengan lainnya membuat birokrasi publik sulit merumuskan ukuran kinerja organisasi publik, sehingga dibuatlah suatu indikator-indikator kinerja.

Indikator-indikator kinerja Menurut Joko Widodo (2001:209) untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dapat dijadikan patokan (standar) menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Terdapat 5 macam indikator kinerja yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). (Joko Widodo dalam Birokrasi Berbasis Kinerja, 2005:91).

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Agus Dwiyanto (2002:53) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang bersifat fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, komputer serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Schuler dan Dowling dalam Yermias (2008:212) menyatakan bahwa kinerja dapat diukur dari kuantitas kerja, kualitas kerja,

kerjasama, pengetahuan tentang kerja, kemandirian kerja, kehadiran dan ketepatan waktu, pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, inisiatif dan penyampaian ide-ide yang sehat, kemampuan supervisi dan teknis.

Dalam Yermias (2008:212), Bernardin dan Russel menyatakan bahwa indikator kinerja terdiri dari beberapa aspek yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonomi dalam bekerja (tanpa selaludisupervisi), dan kerjasama. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Agus Dwiyanto, 2006:50) yaitu :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan

demikian,kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antarprogram dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa indikator kinerja yang disampaikan tersebut, maka yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kualitas akuntabilitas pelayanan. Hal ini dikarenakan kedua indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja TVRI Kalimantan Barat sebagai LPP. Indikator efektivitas disini maksudnya adalah apakah kinerja TVRI dalam mencapai tujuannya sudah efektifkah misalnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TVRI khususnya pada penguasaan teknologi informasi agar mendapatkan hasil yang terbaik dalam menyajikan program acara pertelevisian. Indikator kinerja TVRI juga diukur dari kualitas pelayanan dari pihak TVRI itu sendiri dalam kemampuan mengenali kebutuhan dan

aspirasi masyarakat khususnya pengguna layanan, serta mengembangkan program-program yang diciptakan sehingga dapat tercipta keselarasan antara program dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam menciptakan acara-acara yang menarik dan mendidik sehingga dapat menarik minat para pemirsa televisi untuk selalu menyaksikan acara-acara yang disiarkan oleh TVRI.

Dengan digunakannya ketiga indikator di atas dapat membantu penulis dalam menilai kinerja TVRI Kalimantan Barat sebagai LPP, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan ataupun penurunan kinerja TVRI dan dapat membantu pihak TVRI dalam mengoreksi kekurangan-kekurangan, serta dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). TVRI merupakan stasiun televisi milik pemerintah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan. Hal ini dilakukan karena TVRI sebagai lembaga penyiaran pemerintah yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. TVRI lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak

komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, bersifat independen, netral, tidak komersial. Dengan kondisi seperti itu, akan tetapi TVRI dituntut kemampuan yang dimiliki dalam menyajikan acara televisi yang menarik supaya banyak diminati oleh para pemirsa. Sebagai organisasi publik, pihak TVRI dituntut harus selalu tanggap akan kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu hiburan yang menarik dalam penyampaian informasi, dan harus selalu efektif dalam setiap informasi yang disampaikan sehingga jumlah pemirsa semakin meningkat dari waktu ke waktu. juga diharapkan dapat mengembangkan acara-acara yang disajikan sehingga mampu bersaing dengan televisi-televisi swasta Untuk itu kinerja harus selalu ditingkatkan dalam mewujudkan dari keinginan pemerintah Sebagai sarana informasi terhadap masyarakat.

Kualitas kerja Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Kinerja pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). salah satunya dapat dinilai berdasarkan kualitas kerja mereka. Kualitas kerja berkaitan dengan jumlah hasil pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh seorang pegawai. Semakin banyak jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, tentunya kinerja pegawai yang bersangkutan harus dinilai baik, selama mutu setiap pekerjaannya juga baik. Terkait dengan pegawai pada Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga

Penyiaran Publik (LPP). Di Propinsi Kalimantan Barat, menuturkan sebagai berikut:

“Dari segi kualitas sudah memenuhi target, misalnya dari segi jam kerja kami sudah bekerja sesuai dengan jam kerja yang ada. Jika kami tidak masuk kerja tanpa keterangan berkali-kali tentu kami akan mendapat teguran dan sanksi yang tegas. Selain jam kerja, kami juga bekerja sesuai tugas dan tanggung-jawab masing-masing artinya penanganan utuk program dan tayagan sudah sesuai dengan dana dan sarana yang dianggarkan.”
(wawancara dengan LH tanggal 1 Agustus 2014)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa kualitas pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). sudah cukup baik karena mereka telah bekerja sesuai dengan jam kerja serta Tupoksi yang ada.

Guna memberikan pelayanan terhadap penanyangan dan informasi yang diberikan sesuai dengan jadwal atau sehedul yang ada dan sesuai dengan acara yang dijadwalkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), baik dalam pembangunan daerah sebagai suatu upaya menciptakan proses perubahan sebagai agenda penting yang memerlukan keseimbangan dinamik dan peran serta aktif seluruh potensi yang ada pada masyarakat didaerah maupun dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkup tugasnya atau acara

yang harus ditayang oleh pemerintah terhadap asyarakat, sehingga apa yang menjadi pesan-pesan pemerintah akan sampai kepada masyarakat, akan tetapi karena keterbatasan dan dan sarana kadang hak itu menjadi kendalan dalam penayangann seperti di kemukakan seorang pegawai yang bernama HH.

Saya kadang ingin menayangkan acara acara yang bagus dari daerah akan tetapi karena kurangnya dana, dan bahkan ada acara yang mau mengisinya dari pihak lain dan ini ada dananya, maka terpaksa saya undurkan atau saya ganti (1Agustus 2014).

Padahal apa yang tercermin dalam aturan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPPL Sebagai alat komunikasi Pemerintah, tugas TVRI adalah untuk menyampaikan policy Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan two-way traffic dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha Pemerintah. Pada garis besarnya tujuan Policy Pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib dan sejahtera, dimana tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual. Semua kebijaksanaan Pemerintah beserta programnya harus dapat diterjemahkan melalui siaran-siaran dari studio-studio TVRI yang berkedudukan di Ibukota maupun daerah dengan cepat, tepat dan baik. Semua pelaksanaan TVRI baik di Ibukota maupun di Daerah harus meletakkan tekanan kerjanya kepada

integrasi, supaya TVRI -integrated massmedia Pemerintah

Dalam upaya penyelenggaraan tugas-tugas tersebut di atas, Televisi Kalimantan Barat juga harus mempunyai potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh media televisi, seperti halnya media televisi yang lain, televisi Republik Indonesia sebagai Lembaga Pelayanan Penyiaran pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Penerangan(*The Information Function*)

Program siaran yang bersifat informasi mencakup berita, perkembangan politik, data dan kegiatan ekonomi, pesan-pesan ilmiah, perkembangan sosial dan budaya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.Selain itu juga mendapatkan berbagai informasi mengenai perkembangan mutakiryang terjadi di berbagai Negara dengan mudah dan cepat.

2. Fungsi Pendidikan (*The Education Function*)

Media televisi juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak, dampak/pengaruh positif televisi yang signifikan di kalangan anak- anak adalah bahwa programsiaran televisi yang dapatmeningkatkan pengetahuan, menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lebih lanjut, meningkatkan perbendaharaan kosa-kata, istilah/jargon, dan

kemampuan berbahasa secara verbal dan non verbal, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Selain itu televisi juga efektif dalam menyampaikan pendidikan melalui program acaranya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat pemirsa.

3. Fungsi Hiburan (*The Entertainment Function*)

Diantara tiga fungsi televisi, tampaknya porsi waktu yang paling besar diberikan stasiun televisi adalah pada tayangan program acara yang bersifat hiburan. Berbagai macam hiburan disajikan melalui program-program acaranya, antara lain: musik, film, kartun, olahraga, sinetron, dan sebagainya. Program acara ini mampu memberikan hiburan bagi pemirsanya.

Lebih lanjut terkait dengan kualitas kerjapegawai Televisi di Propinsi Kalimantan Barat pegawai lainnya (CH) menyampaikan sebagai berikut:

“Dari segi kualitas atau jumlah kerja sudah memenuhi syarat. Karena kami bukan pekerja seperti pegawai pabrik yang hasilnya berupa produk tentu penghitungannya beda ya. Kuantitas kerja kami dapat dinilai dari banyaknya tugas yang kami selesaikan secara tepat waktu serta jam kerja yang habiskan sesuai dengan aturan, jadi tidak ada cerita kami membolos semauanya karena jika ketahuan akan ada

sanksinya”. (wawancara dengan ST, tanggal 2 Agustus 2014).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kualitas kerjanya sudah sesuai dengan apa yang menjadi acara yang sudah di jadwalkan oleh Televisi Propinsi Kalimantan Barat, dan sudah cukup memadai baik berdasarkan jumlah tayangan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu maupun pemenuhan jam kerja sesuai dengan aturan yang ada.

Lebih lanjut kepala bagian produksi Televisi Propinsi Kalimantan Barat menyampaikan sebagai berikut:

“Dari segi kualitas sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari selesainya berbagai tugas yang dibebankan kepada mereka. Jika ada yang tidak selesai dengan tepat waktu maka akan ada sanksi. Hal ini juga menjadi salah satu motivasi mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Jenis-jenis program yang ditayangkan juga sudah memenuhi kriteria akan tetapi karena persaingan televisi swasta, sehingga membuat tayangan untuk kita kalah bersaing, bahkan kami juga sering melakukan hal-hal program baru namun adanya keterbatasan yang ada ditempat kami, menjadi kendala tidak /kurang menarik atau seadanya karena kurangnya sarana” (wawancara dengan AS, tanggal 5 Agustus 2014).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pegawai Televisi di Propinsi Kalimantan Barat

sudah cukup memadai. Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan selesainya berbagai tugas yang dibebankan kepada mereka. Adanya sanksi bagi pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu menjadi salah satu motivasi mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Memang dalam melakukan pekerjaan sering dijumpai ada penyimpangan akan tetapi berdasarkan aturan tersebut tidak yang bersifat urgen namaun kaena adanya keterbatasan yang ada. Kurangnya sarana dan prasarana.

Efisiensi kerja pegawai Televisi Republik Indonesia di Kalimantan Barat

Kinerja pegawai pada Televisi Republik Indonesia di Kalimantan Barat salah satunya dapat dinilai berdasarkan efisiensi kerja mereka. Terkait dengan hal tersebut, seorang pegawai menuturkan sebagai berikut:

“Ya berdasarkan pengetahuan saya sudah efisien. Sebab sudah Ada jadwal yang jelas dalam kerja kami sehingga membuat kerja se makin mudah. Selain itu, adanya pencapaian target juga memacu kami untuk bekerja seefisien mungkin agar bisa selesai tepat waktu.”
(Wawancara dengan DN tanggal 24 Agustus 2014)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pegawai TVRI Propinsi Kalimantan Barat sudah efisiensi dalam kerjanya dan sudah cukup baik hal ini disebabkan setiap melakukan kerja sudah ada jadwal yang jelas serta penetapan target kerja sehingga memotivasi para pegawai untuk

bekerja seefisien mungkin agar selesai dan tepat waktu. Salah satu pencapaian target yang telah ditempuh Televisi Republik Indonesia di Kalimantan Barat adalah menyelenggarakan acara/ tayangan dengan baik dan sukses. Hal ini disebabkan TVRI Propinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tatakerja dari pusat. Sehingga TVRI Propinsi Kalimantan Barat adalah sebagai alat komunikasi Pemerintah. Untuk itu TVRI Propinsi Kalimantan tugasnya adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan sudah dapat menciptakan *two-way traffic* (lalu lintas dua jalur) dari rakyat untuk pemerintah. Selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha Pemerintah, dan harus meletakkan tekanan kerjanya kepada integrasi.

TVRI Propinsi Kalimantan Barat dalam bekerjanya sudah efisien hal ini disebabkan karena dalam menjalankan roda organisasi adalah dengan menggunakan manajemen yang diterapkan di TVRI Propinsi Kalimantan Barat yaitu manajemen perkantoran/birokrasi, sehingga apa yang diharapkan TVRI Propinsi Kalimantan Barat menjadi suatu *well-integrated mass media* (media massa yang terintegrasikan dengan baik) dan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai sarana informasi dari pemerintah terhadap masyarakat. Artinya kebijakan Pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertib dan supaya tiap warga Indonesia mengenyam kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual.

TVRI Propinsi Kalimantan Barat programnya sudah dapat diterjemahkan dan di terima oleh masyarakat di daerah kalimantan Barat melalui siaran-siaran ke daerah daerah dengan jelas, cepat, tepat dan baik bahkan di perbatasanpun sudah baik diterima oleh masyarakat, kecuali cuaca sedang tidak baik kadang ada gangguan, sehingga pada garis besarnya TVRI Propinsi Kalimantan Barat sudah menjadi sarana komunikasi dari pemerintah terhadap rakyat dan beerja dengan efisien karena sudah dapat menyampaikan tujuan kebijakan Pemerintah dan program-programnya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia.melalui siaran-siaran dengan cepat, tepat dan baik. Hal itu diungkapkan juga oleh LH :

saye suke banar dengan acara TVRI karena saye suka mengikuti acara yang ditayangan oleh pemerintah misalnya tentang perkebunan, dan ini langka dilakukan oleh Televisi lain, dan apa yang ada dalam programnyapun sama dengan TV Pusat, memang acara kalau untuk seperti saya suke, tapi kalau untuk anak-anak muda tidak disenangin karena kalau di TVRI Kailamnatan Barat menayangkan pilih -pilih acaranya mendidik, tidak sepeeti teleivi swata, kalau yang ditayangkan dalah sifatnya tidak mendidik, cara berpakaian tidak senonoh, akiranya dicontoh oleh masyarakat (4 Agustus 2014).

Juga dikemukakan oleh masyarakat yang bernama RH mengatakan” Saya suka lihat TVRI karena apa yang ditayangkan itu

sifatnya mendidiki, bahkan budaya kalimantanpun sering ditayangkan jadi kalau tidak lihat TVRI kadang tidak ngerti apa budaya kita yang adam bahkan dengan proggram pedidikan yang ditayangkan sangat embantu saya ngajarkan ke anak sayam beda degan TV swasta hanya cari untung sehingga penayangannya tiak diaringm kalau TVRI kan benar-benar diseleksi dahulum maklumlah apa yang diayangkan di TV itu akan dicontoh oleh masyarakat baik yang ua, muda, atauaak-anak, da ini sangat membahayakan (5 Agustus 2014).

Dari apa yang dikemukakan oleh warga tersebut menunjukkan apa yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai sasaran dengan efisien artinya apa yang disampaikan oleh TVRI Propnsini Klimantan Barat sesuai dengan sasaran dan tujuan ari Televisi republik Indonesia bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum negara. Maka hal ini yang membuat dilaksanakan seperti buah simalakama artinya salah satu sisi harus menyangkan program atau acara yang diminanti oleh semua pememirsa baik oleh kalangan anak - anak sampai yang tuan, juga oleh masyarakat. Semangat yang mendasari yang miskin sampai masyarakat yang kaya, akan tetapi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan

publik, maka harus bersifat netral, mandiri dan tidak komersial. Sehingga diperlukan bekerja sesuai dengan anggaran maupun dana yang ada maka dalam merencanakan kegiatan seefisien mungkin. Seperti apa yang dikatakan oleh pegawai yang bernama KK mengatakan :

Kadang kita sebagai pegawai juga bingung dalam melaksanakan pekerjaan ingin menayangkan program yang bagus misalnya ada kegiatan daerah tentang budayam pendidikan yang perlu kami tayangkan dengan durasi waktu cukup lama, namun karena waktunya Cuma sedikit maka menjadi kendala dalam penayangan, hal ini disebabkan karena TVRI sifatnya tidak komersial membuat kita pegawai juga dalam menayangkan harus seefisien waktu/ durasinya (wawancara 3 Agustus 2014).

Begitu juga dikemukakan salah satu pimpinan karena TVRI Propinsi Kalimantan Barat bersifat sifatnya tidak komersial, maka dalam penayangannya harus dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Barat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi.

Akuntabilitas

Televisi Republik adalah merupakan sarana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan atau sosialisasi dalam rangka memperluas informasi, mencerdaskan bangsa, menjaga

persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas nasional serta menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Republik Indonesia. Untuk mengetahui apakah kinerja yang dilakukan pegawai TVRI yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat salah seorang pegawai HH menyampaikan sebagai berikut:

“Ya, TVRI dalam pelayanan terhadap masyarakat cukup lumayan dan cukup baik, artinya apa yang di siaran atau ditayangkan sudah membuat masyarakat terpuaskan dengan keberadaan TVRI. Menurut saya itu sudah cukup memenuhi pelayanan yang diharapkan masyarakat”. (Wawancara 5 Agustus 2014).

Lebih lanjut juga dikemukakan oleh CH menyampaikan sebagai berikut:

“Pelayanan masyarakat di sini menurut saya sudah cukup baik, hanya saja nantinya perlu terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi”. (Wawancara tanggal 5 Agustus 2014).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa pelayanan TVRI di propinsi Kalimantan Barat secara umum sudah cukup baik, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kedepannya pihak TVRI Daerah Kalimantan Barat dapat terus berbenah diri agar pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat atau pemirsa dapat lebih baik, sehingga kedua pihak yakni masyarakat maupun pihak TVRI sama-sama merasakan kenyamanannya. Sehingga dalam melayani terhadap masyarakat yang

diberikan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap masyarakat atau pemirsa TVRI juga bertanggung jawab dalam membenahi dan membangun serta ,emingkatkan fenomena dalam keinginan masyarakat atau publik dalam memberikan siaran ataupun informasi, untuk TVRI berkembang dalam pelaksanaan penyiaran diataranya program- programnya adanya inovasi yaitu memiliki Programa 2 Jakarta, pada saluran/chanel 8 VHF. Programa 2 mulai mengudara pada April 1989 dengan acara tunggal siaran berita bahasa Inggris dengan nama *Six Thirty Report* selama setengah jam pukul 18.30 WIB, di bawah tanggung jawab bagian Pemberitaan. Pada perkembangannya rubrik tersebut berubah nama menjadi English News Service (ENS). Programa 2 TVRI kini mengudara mulai pukul 16.00 - 21.00 WIB dengan berbagai jenis acara berita dan hiburan. Akan tetapi dengan perkembangan yang pesat TVRI juga berbenah diri, pada pada waktu sekarang ini tengah dilakukan negosiasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama di bidang manajemen produksi dan siaran programa 2 TVRI Jakarta dan sekitarnya, dengan adanya rencana perubahan frekuensi dari VHF ke UHF.

Perkembangan itu disesuaikan dengan globalisasi dan persaingan dengan pihak swasta serta dalam meningkatkan kinerja sehingga pada bidang isi siaran akan lebih ditekankan kepada paket-paket jadi (*can product*) dengan materi siaran untuk konsumsi masyarakat metropolitan Jakarta yang nantinya disalurkan ke daerah-daerah, ha; ini dilakukan dalam rangka

tanggung jawab TVRI sebagai media informasi dan sarana dalam menyampaikan pesan- pesan dari pemerintah ataupun dalam pembangunan dan lain lain dari pemerintah terhadap masyarakat. Stasiun Pusat TVRI berada di Jakarta, dan TVRI memiliki stasiun relay pada sejumlah kota di Indonesia. Selain TVRI Stasiun Pusat Jakarta, juga terdapat TVRI Stasiun Daerah pada beberapa ibukota provinsi di Indonesia. TVRI Stasiun Daerah selain merelay TVRI Jakarta, juga memiliki acara yang bersifat lokal (termasuk Berita Daerah) pada jam-jam tertentu. TVRI Stasiun Daerah pada umumnya juga direlay oleh stasiun rely di wilayah provinsi tersebut.

TVRI telah melalui perjalanan panjang dan mempunyai peran strategis dalam perjuangan dan perjalanan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-44 (24 Agustus 2006), TVRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Maka TVRI di Propinsi Kalimantan Barat juga demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat dalam meangani pelayanan, maka TVRI Kalimantan Barat dengan melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang Manajemen, Struktur Organisasi, SDM dan Keuangan. Sehubungan dengan itu maka TVRI propinsi Kalimantan Barat juga tengah melakukan konsolidasi, melalui restrukturisasi, pembenahan di bidang Marketing dan Programing, mengingat sikap mental karyawan dan hampir semua acara TVRI Kalimantan Barat dalam kinerjanya masih mengacu pada

status Perjan yang kurang memiliki nilai jual.

Khusus mengenai karyawan pegawai pimpinan juga bertanggung jawab dalam rangka kualitas pelayanan, maka meningkatkan melalui restrukturisasi dengan hal ini akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, berdasarkan kemampuan masing-masing individu karyawan untuk mengisi fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing, dengan kualifikasi yang jelas. Seperti yang diungkapkan oleh pegawai AR:

Untuk meningkatkan kualitas kerja maka sekarang di kantor ini dalam merekrui pegawai pimpinan dilakukan dengan selektif artinya disesuaikan dengan bidang keahliannya yang diperlukan, disamping itu dibenahi ditata kembali dalam menempatkan para pegawai disesuaikan juga tentang bidang keahliannya. (5 Agustus 2014)

Hal tersebut juga dikemukakan oleh pegawai CH :

Dalam bekerja pimpinan juga sering melakukan pengiriman atau pegawai diberi pelatihan ke Jakarta atau pun ke daerah yang sedang menyelenggarakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja pegawai TVRI, tidak segan-seganya pimpinan akan mengirimkan bahkan kami kadang – kadang baru sampai pontianak pelatihan dari daerah sudah berangkat lagi, ini semua agar para pegawai yang ada katnya akan lebih profesional ya...kadang capek tapi karena sudah

tanggung jawab bekerja dan kami tetap berangkat saja (5 Agustus 2014)

Dengan melalui pendidikan dan pelatihan serta melakukan restrukturisasi tersebut akan diketahui apakah untuk mengisi fungsi tersebut di atas dapat diketahui, dan apakah perlu dicari tenaga profesional dari luar atau dapat memanfaatkan sumberdaya TVRI Propinsi Kalimantan Barat yang tersedia, sehingga dengan itu TVRI Propinsi Kalimantan Barat benar-benar dapat diuji untuk belajar mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun sesama BUMNserta meningkatkan profesionalisme karyawan. Sehingga diharapkan TVRI Propinsi Kalimantan Barat akan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang - undang penyiaran yaitu sebagai TV publik dengan sasaran khalayak yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada TVRI Propinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik. Hal ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kualitas kerja pegawai Televisi Republik Indonesia di Kalimantan Barat telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja yang cukup baik dikarenakan adanya dukungan

sejumlah faktor diantaranya adanya tupoksi yang jelas, motivasi pegawai yang cukup baik, hal ini ditunjang juga oleh kepemimpinan yang mendukung serta sanksi yang tegas bagi pegawai yang malas.

- b. Efisiensi kerja pegawai TVRI Propinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik. Hal ini dapat tercapai karena rata-rata pegawai telah berpengalaman. Akan tetapi karena kurang terbatasnya sarana dan prasarna dan kendalanya aturan dalam perundangan maka kadang sudah ada rencana penayangan akan tetapi karena adanya realy dari pusat yang harus ditayangkan maka kita harus mengencel atau menunda karena harus menayangan acara pusat dan ini karena TVRI merupakan sarana informasi publik.
- c. Kemampuan serta profesionalisme pegawai TVRI Propinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik dan tanggung jawab . Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi terhadap pegawai dalam meningkatkan kerja serta sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya agar lebih profesional dan kinerja yang tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar kinerja pegawai pada TVRI Kalimantan Barat dapat terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas kerja maupun efisiensi kerja. Oleh karena itu, pihak pimpinan TVRI Daerah Propinsi Kalimantan Barat

diharapkan dapat berinisiatif untuk memfasilitasi kemudahan pegawai dalam bekerja baik dengan meningkatkan sarana dan prasarana maupun memberikan kesempatan kepada pegawai yang ingin meningkatkan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal seperti kuliah S2. Disamping itu perlu menayangkan potensi – potensi daerah agar dapat diketahui dipahami tentang permasalahan – permasalahan atau pun pembangunan yang ada di Kalimantan Barat serta budaya budaya yang ada di sekitar Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Agus. 1991. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dharma, Surya. 2011. *Manajemen Kinerja (Falsafah Teori dan Penerapannya)*, cetakan keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hady & Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Irawan, Preasetya (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Copyright by DIA Fisip UI, Depok.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta :Salemba Munaika

- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP/AMPYKN
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Mangkunegara.2008. *Manajemen Sumber Daya perusahaan*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ma'rifah, 2005. *Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi*.Yogyakarta: Aneka Ilmu
- Moehariono, 2011. *Indikator Kinerja Utama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. (1985). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 12 ayat 1 dan 2 tentang *pedoman umum penetapan indikator kinerja di lingkungan instansi pemerintah*.
- Saydam, Ghozali, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid I*, Gunung Agung, Jakarta
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT refika Aditama.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmbs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TRI WAHYUNI

NIM / Periode Lulus : E21110033/2015

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Email address/HP : ayudia.tri882@yahoo.com / 081345312835

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KINERJA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal...12-2-2015

Dr. Arifin, S.Sos, M. AB
NIP. 1974050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada : Februari 2015

Tri Wahyuni
E21110033